BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal adalah satu dari sekian banyak program kerja utama pemerintah, sebab program tersebut dinilai sangat strategis baik dari aspek ekonomis maupun politis. Dalam aspek ekonomis, keberadaan desa sangat memegang peranan penting, terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan negara. Sementara dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak bisa diabaikan. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa, sehingga pembangunan daerah sudah selayaknya harus lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Selama ini, sebagian besar pembangunan desa masih bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakatnya padahal jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Dengan hal itu, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan desa, baik secara fisik maupun non fisik, agar program kegiatan pembangunan desa dalam memajukan daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa tercapai.

Nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yaitu: 1) tercapainya *swasembada* (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan sebagainya; 2) peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain); 3) diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain (Theresia, 2014. hlm. 2).

Kesejahteraan secara ekonomi adalah suatu keadaan kehidupan serba cukup yang dialami oleh seseorang sehingga mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kesejahteraan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografi dan lainnya (Ramadani, 2019. hlm. 1).

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama alokasi dana desa. Alokasi tersebut diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (kemudian dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10%.

Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Masyarakat berhak mengetahui kemana dana tersebut dialokasikan, dan mereka juga berhak melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa agar dana desa yang digunakan tidak disalahgunakan dan dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam memanfaatkan dan mengelola dana desa dibutuhkan kemampuan organisasi dan infrastruktur desa yang kuat. Hal ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat dalam menumbuhkan lingkungan ekonomi yang baik serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan adanya alokasi dana desa diharapkan bisa memperbaiki kondisi perekonomian di perdesaan.

Dana yang disalurkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar dana tersebut dapat didistribusikan secara adil dan tidak terjadinya penyelewengan di dalamnya, karena bila dana tersebut tidak didistribusikan dengan baik, maka pembangunan desa akan terhambat. Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam proses pengelolaan dan pendistribusian tersebut, sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nisa/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Menjalankan amanah ataupun tanggung jawab yang diemban oleh seseorang juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw, (Riwayat Imam Ahmad):

مَا حَظَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidaklah Nabiullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya.”

Pentingnya pribadi yang amanah sebagai seorang muslim dalam hal penggunaan dana desa jika tidak menempatkan pada tempat yang seharusnya, hal itu akan melanggar pada prinsip ADD yang mana dana tersebut sepenuhnya harus digunakan untuk desa. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, diperlukannya pengawasan dan kehati-hatian yang optimal agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyimpangan dari penggunaan dana tersebut.

Desa sering kali diidentikan dengan daerah tertinggal baik dari infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Padahal, potensi sumber daya alam di desa begitu melimpah dan dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni agar bisa dioptimalkan dengan baik. Tetapi seringkali pengetahuan yang terbatas menjadikan mereka tidak mampu untuk mengelola kekayaan alam di sekitar menjadi optimal dan juga menyejahterakan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) poin c dinyatakan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa tersebut, pemerintah berharap program alokasi dana desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di pedesaan yang didasarkan pada kenyataan bahwa desa adalah tempat berdirinya sebagian besar rakyat Indonesia. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Di Desa Tanjung Lalak Utara yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru, di mana kondisi perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, buruh perusahaan, karyawan, pedagang dan wiraswasta, dengan masyarakatnya yang didominasi oleh petani dan nelayan yang pendapatannya tidak dapat diprediksi karena bergantung pada hasil panen, sehingga perekonomian masyarakatnya dikatakan masih tergolong rendah, dan alokasi dana desa pada tahun 2022 sejumlah Rp408.669.534,00 (Empat ratus

delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Diharapkan dengan adanya alokasi dana desa, bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan manfaat yang telah ditentukan sehingga bisa lebih memajukan dan mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara.

Adapun Alokasi Dana Desa yang didistribusikan pada Desa Tanjung Lalak Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Lalak Utara 2018-2022

Tahun	Alokasi Dana Desa
2018	Rp404.128.000
2019	Rp527.284.021
2020	Rp629.011.135
2021	Rp386.980.291
2022	Rp408.669.534

Sumber: Kantor Desa Tanjung Lalak Utara

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan pedesaan yang diselenggarakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi serta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pun juga harus bersifat transparansi agar terdapat sikap keterbukaan antara pemerintah dengan

masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman diantara keduanya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara, kendala dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa tersebut, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara. Dalam rangka menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Lalak Utara, maka diperlukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kotabaru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kotabaru?
2. Apa saja kendala dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kotabaru?
3. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kotabaru.
2. Kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kotabaru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis terutama mengenai masalah pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menambah wawasan dan bisa dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin meneliti tentang analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam.
3. Sebagai masukan dan informasi bagi pemerintah desa khususnya Tanjung Lalak Utara dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan agar dapat menggunakan dana desa lebih baik lagi agar bisa meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan menurut Soekanto dalam Suryosubroto (1997:86-87) adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan,

penggerak, sampai dengan terwujudnya sebuah tujuan. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. (Rudi,2012. hlm 145). Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan yang berada pada kondisi sehat, makmur, aman dan damai dimana terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan air minum bersih serta memiliki pekerjaan yang memadai agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menurut peneliti memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Noor Rizqia Sari, (2015), Skripsi dengan judul *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sungai Bali Kecamatan*

Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini adalah Desa Sungai Bali dalam mengelola dan menggunakan Alokasi Dana Desa sudah akuntabel dan cukup transparansi. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pengelolaan alokasi dana desa, dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noor Rizqia Sari membahas tentang analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Arista Widiyanti, (2016). Skripsi dengan Judul: *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Di Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa. Bedanya penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
3. Nurfika Tonote, (2018). Skripsi dengan judul *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas aparat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa masih belum optimal, karena sering terjadinya keterlambatan pencairan dana. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfika hanya terfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desanya saja.

G. Sistematika Pembahasan

Beberapa istilah untuk memudahkan peneliti dalam pembahasan ini, maka penulis membuat penulisan secara sistematis, dan dalam penulisan penelitian ini, direncanakan akan terdiri dari lima bab, sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang akan menguraikan alasan dalam memilih judul, rumusan masalah yang merupakan permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian yaitu hasil yang diinginkan, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori dan pengertian yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevansi dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

yaitu program ADD, definisi kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sifat dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

Bab keempat berisi penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran tentang lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran.